

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, Ali. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbitan Gadjah Mada. 1984.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang. 2006.
- Gulo, W. Yovita Hardiwati. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: PBFE. 2013.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2016.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media. 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2020.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2021.
- Simorangkir, J.T.C. et.al. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Soeroso, R. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan*. Jakrta : Sinar Grafika. 2012.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa. 1985.

Suwasta, Asep Dedi Suwasta. *Tafsiran Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Ali Publishing. 2011.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2019.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudah. 1968.

Jurnal :

Devi, Sintha Ria. “Tinjauan Yuridis Perceraian atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan”. JURNAL RETENTUM Volume 1, Nomor 1, Agustus 2019.

Hidayat, Anwar. “Penelitian Kualitatif (Metode) : Penjelasan Lengkap”. statistikia.com.

Januartika, Gede Pupung, Komang Febrinayanti Dantes, I Nengah Suastika.

“Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja”. E-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 3 November 2022.

Priyandini, Astari, M. Hisyam Syafioedin, M. Hamidi Masykur. “Dikabulkannya Perceraian dari Perkawinan yang tidak Dicatatkan”. Jurnal Online Universitas Brawijaya. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>.

Wicaksana, Yuristawan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Cria Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”. Lex Renaissance No. 1 VOL 3 Januari 2018: 86-108.

Wawancara :

Wawancara Bapak Danardono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang. 2 mei 2023.

Internet :

Metode Pendekatan. Idtesis.com. <https://idtesis.com>.

Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding). <https://ditjenpp.kemenkumham.co.id>.

Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2013. *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam.

Pemerintah Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Agung. 2018. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan. Mahkamah Agung. Jakarta.

Hakim Pengadilan Negeri Stabat. 2013. *Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:*
26/Pdt.G/2013/PN.Stb. Kepanitraan Pengadilan Negeri Stabat. Stabat.